

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
Lokasi	: Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Papua Barat
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 37.835.121.159,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.835.121.159,00
Keluaran	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	44 Orang/ Bulan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
Lokasi	: Provinsi Papua Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.835.121.159,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.835.121.159,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 37.835.121.159,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp. 37.345.521.159,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp. 1.437.870.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp. 1.437.870.000,00
	[#] Belanja uang representasi DPR Papua Barat Sumber Dana : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat					Rp. 1.437.870.000,00
	[-] Uang Representassi DPR Papua Barat					Rp. 1.437.870.000,00
	Belanja Uang Representasi DPRD	1	Tahun	1.437.870.000,00	0 %	Rp. 1.437.870.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp. 299.167.849,90
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp. 299.167.849,90
	[#] Belanja Tunjangan DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 299.167.849,90
	[-] Tunjangan Keluarga DPR Papua Barat					Rp. 299.167.849,90
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	1	Tahun	299.167.849,90	0 %	Rp. 299.167.849,90
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp. 316.800.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp. 316.800.000,00
	[#] Belanja Tunjangan DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 316.800.000,00
	[-] Tunjangan Beras DPR Papua Barat					Rp. 316.800.000,00
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	1	Tahun	316.800.000,00	0 %	Rp. 316.800.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD					Rp. 143.787.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD					Rp. 143.787.000,00
	[#] Belanja Uang Paket DPR Papua Barat Sumber Dana : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat					Rp. 143.787.000,00
	[-] Uang Paket DPR Papua Barat					Rp. 143.787.000,00
	Belanja Uang Paket DPRD	1	Tahun	143.787.000,00	0 %	Rp. 143.787.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp. 2.084.911.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp. 2.084.911.500,00
	[#] Belanja Tunjangan DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.084.911.500,00
	[-] Tunjangan Jabatan DPR Papua Barat					Rp. 2.084.911.500,00
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1	Tahun	2.084.911.500,00	0 %	Rp. 2.084.911.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp. 387.245.513,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp. 387.245.513,00
	[#] Belanja Tunjangan DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 387.245.513,00
	[-] Tunjangan Alat Kelengkapan DPR Papua Barat					Rp. 387.245.513,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1	Tahun	387.245.513,00	0 %	Rp. 387.245.513,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp. 31.318.875,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp. 31.318.875,00
	[#] Belanja Tunjangan DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 31.318.875,00
	[-] Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPR Papua Barat					Rp. 31.318.875,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1	Tahun	31.318.875,00	0 %	Rp. 31.318.875,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp. 8.118.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp. 8.118.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.118.000.000,00
	[-] Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat					Rp. 8.118.000.000,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Tahun	8.118.000.000,00	0 %	Rp. 8.118.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp. 2.029.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp. 2.029.500.000,00
	[#] Belanja Tunjangan DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.029.500.000,00
	[-] Tunjangan Reses DPR Papua Barat					Rp. 2.029.500.000,00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1	Tahun	2.029.500.000,00	0 %	Rp. 2.029.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp. 745.740.724,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp. 745.740.724,00
	[#] Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 745.740.724,00
	[-] Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat					Rp. 745.740.724,00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Tahun	745.740.724,00	0 %	Rp. 745.740.724,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD					Rp. 352.447,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD					Rp. 352.447,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 352.447,00
	[-] Pembulatan Gaji DPR Papua Barat					Rp. 352.447,00
	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1	Tahun	352.447,00	0 %	Rp. 352.447,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp. 11.291.021.100,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					Rp. 232.320.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 232.320.000,00
	[-] luran Jaminan Kesehatan bagi DPR Papua Barat					Rp. 232.320.000,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1	Tahun	232.320.000,00	0 %	Rp. 232.320.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					Rp. 11.222.400,00
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.222.400,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja DPR Papua Barat					Rp. 11.222.400,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1	Tahun	11.222.400,00	0 %	Rp. 11.222.400,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD					Rp. 14.378.700,00
	[#] Belanja Jaminan Kematian DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 14.378.700,00
	[-] Jaminan Kematian DPR Papua Barat					Rp. 14.378.700,00
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1	Tahun	14.378.700,00	0 %	Rp. 14.378.700,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD					Rp. 11.033.100.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Perumahan DPR Papua Barat Sumber Dana : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat					Rp. 11.033.100.000,00
	[-] Tunjangan Perumahan DPR Papua Barat					Rp. 11.033.100.000,00
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1	Tahun	11.033.100.000,00	0 %	Rp. 11.033.100.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp. 10.120.326.150,10
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp. 10.120.326.150,10
	[#] Belanja Tunjangan Transportasi DPR Papua Barat Sumber Dana : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat					Rp. 10.120.326.150,10
	[-] Tunjangan Transportasi DPR Papua Barat					Rp. 10.120.326.150,10
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1	Tahun	10.120.326.150,10	0 %	Rp. 10.120.326.150,10
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp. 339.480.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp. 339.480.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengabdian DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 339.480.000,00
	[-] Uang Jasa Pengabdian DPR Papua Barat					Rp. 339.480.000,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1	Tahun	339.480.000,00	0 %	Rp. 339.480.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp. 489.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp. 489.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp. 489.600.000,00
	[#] Belanja Dana Operasional Pimpinan DPR Papua Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 489.600.000,00
	[-] Dana Operasional Pimpinan DPR Papua Barat					Rp. 489.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1	Tahun	489.600.000,00	0 %	Rp. 489.600.000,00
Jumlah :						Rp. 37.835.121.159,00
			Provinsi Papua Barat,..... Kepala SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT			
			HENDRA MARTHINUS FATUBUN, S.Hut NIP. 197912022007011014			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				